Pareto: Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis
Vol. 5 No. 2 September 2020

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NIAS

Jhon Firman Fau[1]

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Melalui penelitian ini dilakukan analisis PAD Kabupaten Nias. Dengan menggunakan data time series, model penelitian ini diestimasi dengan metode Rasio PAD terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PAD sangat minim peranan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dimana sejak tahun 2005-2019 rata-rata kontribusi PAD Pemerintah Kabupaten Nias sebesar 7% dan tergolong sangat kurang. Dengan demikian, diperlukan upaya dari Pemerintah daerah Kabupaten Nias untuk meningkatkan PAD-nya sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Keyword: ***Pendapatan Asli Daerah***

LATAR BELAKANG

Semua negara di dunia ini mengharapkan kemajuan negaranya dari semua sektor baik sektor pendidikan, sektor ketahanan pangan, sektor kesehatan dan sektor perindustrian, sektor pertahanan keamaman dan lain-lain. Negara Indonesia sejauh ini berada dalam posisi sebagai negara sedang berkembang dengan memiliki jumlah penduduk sekitar 250 juta serta 33 propinsi. Maka dengan jumlah penduduk yang sangat banyak maka pemerintah menerapkan beberapa strategi dalam memajukan setiap daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten. Salah satu langkah yang sudah dijalankan atau ditetapkan pemerintah yaitu dengan mengsahkan Undang-Undang Otonomi Daerah dengan tujuan agar pendistribusian pembangunan bisa merata sehingga taraf hidup masyarakat mengalami peningkatan.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

[1] Dosen Tetap Program Studi Manaemen STIE Nias Selatan (jhontelda@gmail.com)

Disahkan dan di berlakukan (Undang - Undang RI No, 1999) Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan di revisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan di revisi dengan (Presiden Indonesia dan DPRRI, 2014) Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dalam kemandirian keuangan.

Dalam memajukan suatu daerah atau yang menjadi bagian dari otonomi daerah khususnya Kabupaten Nias peran pendapatan asli daerah sangat berguna dalam pembiayaan rutin pemerintah daerah karena besar kecilnya pendapatan asli daerah menjadi acuan kepada pemerintah dalam menunjukkan kemandiriannya melaksanakan otonomi daerah. Upaya-upaya meningkat pendapatan asli daerah Kabupaten Nias dalam kenyataannya sangatlah berguna yang menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah yang digunakan sebagai pembiayaan utama pengeluaran rutin pemerintah daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Sesuai uraian diatas yang menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Nias sebagai daerah otonom.

TINJAUAN LITERATUR

1. Otonom daerah

Otonomi secara harafiah bisa dikatakan sebagai daerah. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos artinya diri mereka sendiri dan namos artinya hukum atau aturan. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*) (Sjafrizal, 2018)

Menurut (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004) , definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi, yang

diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Daerah otonom ialah kesatuan masyarakat yang berdasar pada hukum yang mempunyai batas wilayah serta berwenang dalam mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut (Mardiasmo, 2018) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Konsep dasar Otonomi Daerah

   Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah dalam penjelasan umum bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip-prisnsip sebagai berikut :

   a. Prinsip otonomi seluas-luasnya, berarti daerah diberi kewenangan mengurus dan mangatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
   b. Prinsip otonomi yang nyata, berarti suatu prinsip bahwa menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata telah ada berpontensi untuk tumbuh., hidup dan berkembang sesuai dengan potensi ke khasan daerah

3. Ciri Utama Keberhasilan Pelaksanaan Daerah Otonom. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2001:167) adalah sebagai berikut.
   a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
   b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar

4. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, pada pasal 157 sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonomi terdiri dari :
   a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
      1) Pajak daerah,

2) Retribusi derah,
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan, dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Desentralisasi

Menurut (Syahputra, 2017) Faktor lainnya adalah struktur dan sistem pemerintahan desentralisasi, sistem pemerintahannya yang sederhana dianggap kurang desentralisasi bila dibandingkan sistem kompleks. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan guna mencegah disintegrasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang otonomi daerah yang tujuan memberikan kewenangan kepada daerah otonom dalam memajukan potensi daerah yang dimiliki. Menurut (Sjafrizal, 2018) pelimpahan wewenang pengelolaan pembangunan lebih banyak kepada daerah, terutama untuk tingkat Kabupaten dan Kota. Selanjutnya Undang-Undang otonomi Daerah juga melakukan desentralisasi Fiskal dimana pemerintah Daerah diberikan kewenangan pengelolaan pengeluaran keuangan yang lebih besar sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mampu memberikan jawaban atas peranan atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah di berbagai daerah di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan (Harinoto, 2015) Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja daerah sangat minim artinya tingkat ketergantungan pembiayaan rutin daerah sangat dari luar daerah dan pemerintah pusat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Rawung et al., 2016) Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan kota manado setiap tahunnya tidak stabil kadang naik kadang turun, Hal ini terjadi diakibatkan oleh situasi perekonomian nasional yang tidak stabil sehingga berpengaruh besar sampai kedaerah-daerah.

Penelitian yang dilakukan (Oktavina, 2012) Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah, hasil penelitian menunjukkan di Kabupaten Barito Utara kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah masih sangat kecil.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Berwulo et al., 2017) Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkkan pendapatan asli daerah belum mampu menunjang sepenuhnya pengeluaran pemerintah kota jayapura dalam membiayai anggaran rumah tangganya

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan (Sri Artini & Taras, 2017) Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali, hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap tahunnya Kabupaten Badung dalam realisasi penerimaan pajak daerahnya sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan karena penerimaan pajak daerahnya sudah melebihi dari target penerimaan pajak daerahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data skunder dengan jenis data *time series* dan interval waktu selama 15 tahun dari tahun 2005-2019. Data diperoleh dari instansi yang terkait yaitu BPS Kabupaten Nias dengan cara melakukan studi pustaka. Alasan peneliti memilih tahun 2005 sebagai tahun dasar di karenakan pada tahun 2003 Kabupaten Nias Selatan terbentuk sebagai daerah otonom, sehingga wilayah kabupaten Nias berkurang dalam memberi kewenangan dalam menggali potensi-potensi daerah. Kemandirian Fiskal kabupaten Nias di ukur dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Daerah

Kontribusi menggambarkan besaran sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Rumus menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah

$$Kontribusi\ PAD = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Tabel 1

Kriteria Kontribusi

Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup baik
20,10-30,00	Sedang
10,10-20,00	Kurang baik
<10	Sangat kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, Yuni 2005 dalam (Laksmi & Supadmi, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pendapatan Asli terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Nias sejak Tahun 2005-2019

Hasil Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Nias

No	Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
1	2005	7.791.308	243.622.528	3%	Sangat kurang
2	2006	10.306.879	392.646.153	3%	Sangat kurang
3	2007	16.902.608	473.649.297	4%	Sangat kurang
4	2008	26.360.852	541.048.930	5%	Sangat kurang
5	2009	23.169.535	572.673.461	4%	Sangat kurang
6	2010	17.629.575	294.108.242	6%	Sangat kurang
7	2011	18.943.904	404.360.947	5%	Sangat kurang
8	2012	30.531.670	419.400.136	7%	Sangat kurang
9	2013	44.726.141	463.150.328	10%	Sangat kurang
10	2014	65.082.210	515.836.196	13%	Kurang Baik
11	2015	70.892.591	691.021.859	10%	Kurang Baik
12	2016	82.840.434	818.455.989	10%	Kurang Baik
13	2017	77.222.210	820.788.152	9%	Kurang Baik
14	2018	88.754.607	901.833.539	10%	Kurang Baik
15	2019	86.228.067	808.255.467	11%	Kurang Baik

Sumber : Hasil Olahan Sendiri

Berdasarkan hasil analisis peranan atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah selama 15 tahun sejak tahun 2005-2019 tergolong sangat kurang dan kurang baik. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 peranan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias mengalami peningkatan dari kategori sangat kurang menjadi kategori kurang baik, meskipun tergolong kurang baik namun hal ini perlu diapresiasi secara umum karena selama 7 tahun terakhir rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerahdi Kabupaten Nias sebesar 10%, tentu hal ini menjadi pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Nias untuk terus menggali potensi-potensi daerah yang sumbangsih besar dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Secara umum Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Pendapatan Daerah selama 15 tahun rata-rata sebesar 7%, tentu hal ini sangat jelas bahwa Kabupaten Nias Selatan yang telah terbentuk sejak 15 tahun dalam membiayai pengeluaran rutin sanagt bergantung pada pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Perkembangan Kontribusi PAD Kabupaten Nias

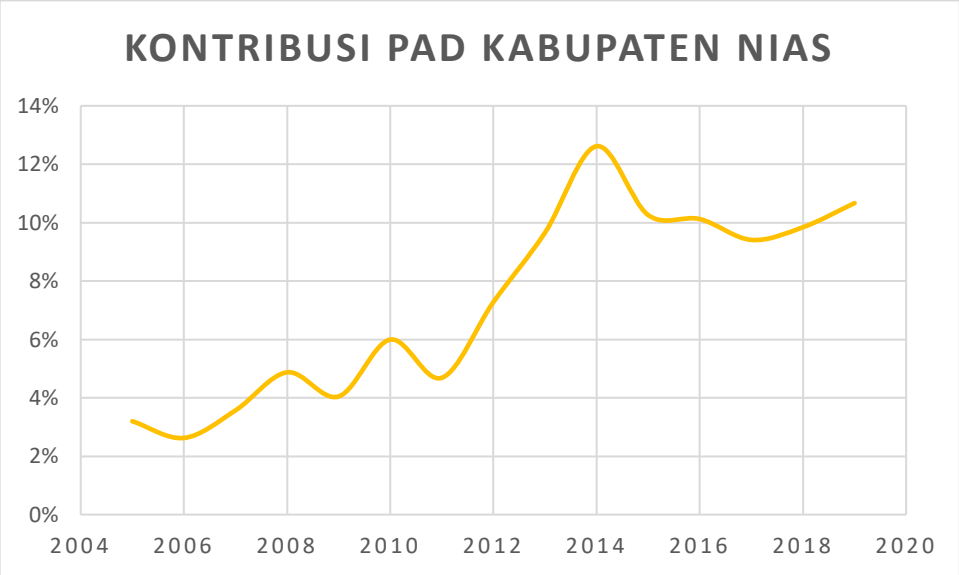

Sumber : Hasil olahan Sendiri

Sejak tahun 2005 sampai tahun 2019 , trend perkembangan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias mengalami peningkatan, pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2005-2013 masuk dalam kategori sangat kurang, dan pada tahun 2013 sampai tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias mengalami peningkatan yang rata-rata penerimaan PAD sebesar 10% dan masuk dalam kategori kurang baik, tentu hal ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nias dalam mendukung, meningkatkan dan merencanakan serta menggali potensi-potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang otonomi daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi atau peranan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias melalui rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Dari hasil penelitian di temukan bahwa tingakt Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias sangat minim meskipun dari tahun 2013 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Melalui hasil penelitian ini maka dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias bahwa sangat dibutuhkan upaya peningkatan PAD Kabupaten Nias. Upaya ini selain untuk meningkatkan kemandirian Keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue (PAD). *Berkala Ilmiah Efisiensi*, *17*(01), 22–33.

Harinoto, H. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah 2013. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, *11*(1), 28. https://doi.org/10.21067/jem.v11i1.867

Laksmi, S., & Supadmi, N. (2014). Efektivitas Pemungutan PAD Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, *9*(2), 515–524.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. In *Penerbit Andi*.

Pendapatan, A., & Daerah, A. (2004). *Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model*.

Presiden Indonesia dan DPRRI. (2014). UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1–460. http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/u/u/uu_23_tahun_2014.pdf

Rawung, N., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado*. *4*(1), 496–502. https://www.neliti.com/id/publications/2920/analisis-pendapatan-asli-daerah-dan-pencatatannya-pada-dinas-pendapatan-kota-man%0A

Sjafrizal. (2018). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. In *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (pp. 317–343).

Sri Artini, L. G., & Taras, T. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *6*(5), 249569.

Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *1*(1), 12–21.

Undang - Undang RI No, 22. (1999). Tentang Pemerintahan Daerah. *Local Government*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Dpr (2004). http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf